

SAMSAT PANDA BIMA



HIMBAUAN

Kepada Masyarakat Pemilik Kendaraan Bermotor **KAMI HIMBAU** Untuk Melakukan Registrasi Ulang Dengan Membayar Pajak Kendaraannya Agar Kendaraan Tersebut Tidak Dihapus Dalam Database Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat. Sesuai **UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN PASAL 74 AYAT 2 HURUF A** Menyatakan Bagi Kendaraan Bermotor yang Tidak Melakukan Registrasi Ulang Sekurang-kurangnya 2 Tahun Setelah Habis Masa Berlaku Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) **DAPAT DIHAPUS DARI DAFTAR REGISTRASI DAN IDENTIFIKASI KENDARAAN BERMOTOR**

CALL CENTRE 1500786

SAAPPENDA NTB @SAAPPENDA NTB @SAAPPENDA NTB @saappenda.ribzprov.go.id



Tumpukan sampah yang berserakan di pasar Tente dikeluhkan pengguna jalan dan pengunjung pasar. Berita di halaman 5.

Kasus ADD Waduruka, Polisi Sita Uang "Tutup Mulut" dari Oknum LSM

Bima, BimaEkspres.- Penyelidikan kasus dugaan penyelewengan Anggaran Dana Desa, di Desa Waduruka Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima terus bergulir. Terakhir, unit Tipidkor Polres Bima Kota menyita uang senilai Rp 13 juta dari oknum Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Selain menyita uang belasan juta, jelas

Kapolres Bima Kota melalui Kasat Reskrim IPTU Hilmi Manossoh Prayugo S Ik, juga telah memeriksa oknum anggota LSM berinisial HR. Dia menerima uang yang konon bersumber dari bagian ADD dimaksud. "Uang itu konon sebagai uang tutup mulut terkait kasus itu. Makanya kita sita dan periksa oknumnya. Sekali lagi masih ko-

non ya," ungkap Hilmi menjawab media ini Rabu (13/11).

Dari pengakuan oknum LSM itu lanjut Hilmi, uang belasan juta tersebut dipinjam melalui Kepala Desa Waduruka sejak tahun 2018 lalu. Hanya saja, tidak dijelaskan

Baca: Tutup Mulut... Hal 3

Pemuda Spesialis Begal di Belo Diringkus Polisi



Pelaku saat diamankan oleh aparat

Bima, BimaEkspres.- Tim Buru Sergap (Buser) Satreskrim Polres Bima, berhasil menangkap pelaku curas (Begal) Liuna alias Liu (23) di ru-

mahnya di Desa Ngali, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima, Rabu (13/11). Pelaku mengaku baru delapan kali melakukan begal di wilayah Belo.

"Tim Buser Satreskrim Polres Bima berhasil menangkap terduga pelaku Curas (begal) di rumahnya di Desa Ngali Kecamatan Belo Kabupaten Bima, belaku bernama Liuna alias Liu," jelas Kasat Reakrim Polres Bima IPTU Hendry Cristianto, SSos.

Kata Kasat, penangkapan terduga pelaku begal, berdasarkan Laporan Polisi Nomor: Lp/ 38/1/2019/ Res Bima/ P.Belo tgl 22 Januari 2019 di Desa Lido, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima. Korbannya adalah Ahmad, warga Desa Waworada, Kecamatan Langgudu.

"Pelaku sudah beberapa kali melakukan aksi bersama temannya dengan cara memberhentikan korban yang sedang melintas dan tidak segan-segan membacok korban kemudian mengambil HP atau motor milik

Baca: Begal... Hal 4

SAMSUNG STORE-BIMA
DISTRIBUTOR RESMI SAMSUNG PHONE & ACCESSORIES
SAMSUNG



LEBIH MURAH
DIJAMIN ORIGINAL
GARANSI RESMI

Jl. Gajah Mada, No. 1 Kota Bima
(bima) bima.ribzprov.go.id

Kementerian Keuangan RI
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Raba Bima

AYO BAYAR PAJAK UNTUK INDONESIA YANG LEBIH BAIK

500200

CATATAN REDAKSI

Jangan Enggan dong.

RUPANYA, rekomendasi Komisi Aparat Sipil Negara (KASN) ke Wali Kota Bima, H Muhammad Lutfi, SE masih menyisakan persoalan. Sejumlah sejumlah ASN Pemkot Bima mengadukan kebijakan mutasi yang dianggap melanggar aturan.

KASN RI pun memerosesnya dan meminta agar ASN yang "kehilangan" jabatannya dikembalikan ke posisi awal. Namun, rupanya hingga kini belum semua direspon.

Kenyataan itu membuat KASN "geram" dan hendak melaporkan Wali Kota Bima ke Presiden RI. Wali Kota Bima dianggap enggan menindaklanjuti rekomendasi sepenuhnya atas proses mutasi dan demosi yang dilakukannya beberapa waktu yang lalu.

Bagi KASN ASN yang terdampak kebijakan itu harus dikembalikan posisi dan jabatannya, bukan hanya lima orang seperti yang sudah dilakukan oleh Pemkot, melainkan seluruhnya sesuai dengan rekomendasi.

Hanya saja sebelum melakukan laporan ke Presiden, KASN mengaku akan kembali melayangkan surat teguran untuk Wali Kota Bima agar segera menindaklanjuti rekomendasi secara utuh. Jika surat teguran ini tidak diindahkan, maka laporan harus dilakukan kepada Presiden.

Untuk itu, diharapkan agar Wali Kota Bima dapat menindaklanjutinya. Agar persoalan ini tidak menjadi panjang. Apalagi KASN adalah lembaga Negara yang ditugaskan untuk meluruskan aturan.

Kita juga tidak ingin Kota Bima memiliki catatan tidak baik di pusat atau di KASN. Karena ketidakpatuhan itu tidak menjadi contoh yang baik, apalagi jika KASN menceritakan kepada daerah lain.

Kita menginginkan Kota Bima menjadi contoh baik. Jangan karena KASN tidak bisa memberikan sanksi, sehingga diabaikan.

Sekali lagi ini menjadi cerminan pemerintah, jangan sampai Presiden memberikan sanksi kepada kepala daerah. Masyarakat juga harus diberikan contoh bagaimana taat pada aturan. Jika pemerintah saja tidak menaatinya, bagaimana masyarakat bisa mengikutinya.

Pemerintah harus menjadi contoh yang baik, bukan sebaliknya. Demdam politik saat Pilkada, tidak boleh terus dibawa, karena bisa merusak kinerja birokrasi. Jika birokrasi amburadul, bagaimana pemerintahan bisa berjalan dengan baik.

Serta bagaimana bisa memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Teguran dan rekomendasi KASN harus menjadi atensi dan pembelajaran dan tidak enggan untuk melaksanakannya.

Seperti dalam bunyi Surat Keputusan yang kerap dikeluarkan, selalu ada catatan. Jika ada kekeliruan dalam penetapannya, akan ditinjau kembali. (*)

Polemik Pembangunan Taman Kodo, Bagaimana Sikap TP4D?

Kota Bima, BimaEkspres.- Polemik lahan pembangunan Ruang Terbuka Publik (RTP) Taman Kodo, yang merogoh kocek APBD Kota Bima sebesar Rp 4,3 Miliar, nampaknya terus bergulir.

Terlebih setelah pemilik lahan mengancam akan menghentikan jika status tanah sawah hasil tukar guling pada 2004 silam tersebut, tak berujung legalitas kepemilikan di atas sertifikat.

Lalu bagaimana peran Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) yang didalamnya ada unsur Kejaksaan dan Kepolisian, terkait sengkaret ini?

Kasat Reskrim Polres Bima Kota, IPTU Hilmy Manossoh Prayugo S Ik, pada sejumlah wartawan

Rabu (13/11) kemarin, justru mengaku aparat yang masuk dalam TP4D, tidak hadir dan tidak undang saat gelar pemaparan program oleh Satker pemilik pekerjaan tersebut.

"Saya tanya anggota tidak ada yang tahu dan tidak hadir saat pemaparan program awal," ujarnya di Mapolres Rabu siang kemarin.

Sementara Kasi Intel Kejari Bima, Ikhwanul Muslimin SH MH menegaskan, pihaknya tidak berkewenangan mengurus terkait lahan. Sebab katanya, tugas inti TP4D sesuai permintaan pemerintah, hanya untuk mengawal dan mengawasi proses pekerjaan fisiknya saja.

"Kalaupun ada masalah soal lahan atau ada tuntutan serta klaim warga, kalau

diminta pemerintah untuk membantu penanganannya ya kami mediasi," ujarnya kepada sejumlah wartawan Rabu siang kemarin.

Meski sebelumnya selaku Ketua TP4D RTP mengaku mengetahui masalah lahan tersebut. Dia bahkan mengaku sangat tahu, sebab anggotanya yang ikut terlibat saat sosialisasi dengan warga setempat termasuk sejumlah pemilik lahan.

"Pada saat sosialisasi seluruh warga menyepakati pekerjaan RTP dilaksanakan. Kesepakatan itu tertuang dalam berita acara yang ditandatangani bersama warga setempat," urainya.

Ikhwanul mengaku risih dengan sejumlah pernyataan yang terkesan saling

lempar tanggungjawab tersebut.

Misalnya pernyataan Kabid Aset Abdilah yang menegaskan status tanah terbagun RTP Kodo itu, tidak tercatat pada aset Kota Bima.

"Kami sebagai TP4D kan tidak terlalu jauh mengurus keabsahan aset, tugas kami mengawal dan mengawasi pekerjaan," tukasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Kabid Cipta Karya, Fahd menyatakan sebelum merealisasikan pekerjaan fisik, sudah digelar dan dipaparkan bersama TP4D.

Meski diakuinya pula, soal aset itu milik Kota, tidak diketahuinya karena itu katanya ranah Bidang Aset. (BE09)

Humas NTB Gelar Bimtek Peningkatan SDM



Mataram, BimaEkspres.- Jaringan Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda Provinsi NTB menggelar Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Bidang Kehumasan, Rabu (13/11/2019).

Kegiatan tersebut berlangsung di Hotel Grand Madani Kota Mataram, dengan tema Mamahami Public Speaking dan Me-

ngelola Media Yang Efektif bagi Humas Pemerintah.

Narasumber tunggal Bimtek kali ini, Dr. Hernani Sirikat, MA. Narasumber ini terbeliung spesial. Di samping sebagai Dosen Hukum

dan Etika Media, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, beliau juga merupakan Pengurus PWI Pusat dan Pendiri Media Watch era reformasi.

(BE04)

Pemkot Bima Buka 175 Formasi CPNS, Waspadai Para Calo

Kota Bima, BimaEkspres.-

Untuk pemenuhan kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Bima, akan diisi 175 formasi. Pendaftaran sendiri sudah mulai dibuka.

Selama pendaftaran, peserta diminta jangan tergiur iming-iming oknum yang mengaku bisa meluluskan.

Pemkot Bima mendapatkan jatah jumlah formasi penerimaan ASN berdasarkan Keputusan Menpan-RB Nomor : 817 tahun 2019 tentang penetapan kebutuhan PNS ditindaklanjuti dengan keputusan Walikota Bima nomor :188.45/703/800/XI/2019 tanggal 1 November 2019 tentang pe-

netapan Formasi CPNS.

Sejak 1 hingga 15 November Pemkot Bima membuka kesempatan kepada warga negara Republik Indonesia. Persyaratan dan tatacara pendaftaran sesuai dengan prosedur dan formasi yang dibutuhkan.

Kepala BKPSDM Kota Bima, M Saleh menyampaikan, jumlah formasi yang dibutuhkan 175 orang. Mereka akan mengisi kebutuhan tenaga pendidikan, kesehatan dan teknis lainnya.

Untuk pendaftar sudah dibuka sscasn//bkn.go.id mulai 11 sampai dengan 25 November 2019. Batas waktu pendaftaran dan

unggah dokumen persyaratan sampai pukul 23.59 wita.

Setelah tahapan pendaftaran tersebut, kata dia, pelamar yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi diumumkan melalui situs bkpsdm.bimakota.go.id dan melalui papan pengumuman kantor BKPSDM Kota Bima.

"Bagi peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi, selanjutnya mengikuti Seleksi Kemampuan Dasar (SKD) dengan menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) yang diselenggarakan di SMKN 1 Kota Bima," katanya.

Saleh meminta para calon pe-

lamar terus mengikuti perkembangan informasi. Pemerintah Kota Bima tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun, dari oknum yang mengatasnamakan tim seleksi CPNS 2019.

Sehingga peserta agar tidak melayani tawaran-tawaran dari pihak tertentu, untuk mempermudah penerimaan sebagai CPNS tahun 2019.

"Pemerintah daerah menegaskan selama proses tahapan penerimaan CPNS, peserta tidak dipungut biaya. Serta jangan percaya kepada oknum yang mengatasnamakan panitia penyelenggara yang siap memban-

tu menjadi CPNS, bila mengalami dan atau mengetahui kejadian tersebut segera laporkan ke pihak berwajib," tegasnya.

Saleh menambahkan, terkait rincian formasi CPNS lingkup Pemerintah Kota Bima diantaranya, untuk formasi Disabilitas ada 3 alokasi formasi. Kemudian tenaga pendidikan sebanyak 43 formasi, lalu tenaga kesehatan 10 formasi dan 119 tenaga teknis.

"Bagi peserta yang lulus semua tahapan seleksi, maka berdasarkan jadwal pengumuman kelulusan akhir pada bulan April 2020," tambahnya, tutupnya (BE06)

Kejari Telusuri Dugaan Gadai Fiktif di Pegadaian Godo Senilai Rp 730 Juta

Bima, BimaEkspres.-

Kasus dugaan korupsi dengan gadai fiktif kembali ditelusuri Kejaksaan Negeri (Kejari) Raba Bima. Kali ini penyidik tengah menangani dugaan korupsi di Kantor Unit Pegadaian Cabang (UPC) Godo.

Kepala Kejaksaan Negeri Bima melalui Kasi Pidsus, I Wayan Suryawan menjelaskan, dugaan korupsi ini mengalami kerugian mencapai Rp. 730 juta. Dimana, ada puluhan jenis barang berbagai macam yang digadaikan, yakni dengan cara mengada-

ikan kembali barang yang sudah digadaikan oleh para nasabah.

"Modusnya gadai fiktif dan baru dilaporkan dua bulan belakangan ini. Masih terus kita selidiki. Santai," ujarnya, kepada wartawan Rabu (13/11).

Untuk pengembangan kasus

ini Lanjut Wayan, hingga kini pihaknya sudah memeriksa sedikitnya 15 orang. Yang terdiri dari pihak nasabah maupun dari pihak pegadaian setempat.

Jika tuntas memeriksa para saksi, ia mengaku akan langsung menetapkan tersangka dalam

kasus ini. Hanya saja Wayan enggan membongkar akan ada berapa orang yang akan terlibat dalam kasus kredit fiktif tersebut.

"Dipastikan akan ada tersangka dalam kasus ini, kalau tidak bulan ini mungkin bulan depan penetapan tersangkanya," ungkapnya. (BE09)

Anggota BPD Terpilih Segera Bentuk Komposisi

Bima, BimaEkspres.-

Kadis DPMDes melalui Kabid KPA Sosbud, Firmansyah, S.Sos, M. Ap, menegaskan kepada anggota BPD terpilih untuk segera membentuk komposisi mulai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Bendahara. Hal ini dianggap perlu karena harus membuat regulasi dan Perdes.

"Anggota BPD yang dilantik di Kabupaten Bima, untuk segera menentukan komposisi Ketua, wakil ketua, sekretaris dan bendahara dan dibuatkan berita acara," ujarnya saat pelantikan anggota BPD terpilih di aula Kantor Camat Belo, Rabu (13/11).

Kata dia, rapat penentuan ketua dan jajaran, harus dipimpin oleh yang lebih tua atau senior. Siapapun terpilih akan ditetapkan dalam surat keputusan.

"Selain Komposisi Ketua, Wakil, Sekretaris dan Bendahara, juga ada Bidang pemerintahan dan kemasyarakatan, bidang pembangunan dan kemasyarakatan di struktur BPD," katanya.

Kata dia, BPD adalah bagian dari unsur pemerintahan. BPD jangan berbeda pemahaman dalam membangun desa.

"BPD, Kepala Desa dan Pemerintahan Desa harus satu untuk mewujudkan *dana ro rasa*



ma taho," ujarnya.

Kata dia, kenapa BPD harus segera membentuk unsur kepe-

ngurusan, supaya bisa mewujudkan regulasi di desa dan mengawasi setiap pelaksanaan program.

"Tiga prinsip utama yang harus dipegang teguh oleh BPD dalam melaksanakan tugas, yaitu Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan," jelasnya.

Karena banyak anggota BPD yang baru terpilih, pihaknya me-

ningatkan untuk sering berkomunikasi kepada Pemerintah tingkat Kecamatan maupun Kabupaten. Pihaknya membuka ruang untuk memberikan pemahaman berkaitan dengan tugas dan fungsi. (BE05)

Tutup Mulut... dari hal.1

secara rinci untuk kepentingan apa uang tersebut dipinjamkan.

"Yang jelas itu uang itu bagian dari anggaran dana desa yang dipermasalahkan itu," sambungnya seraya menambahkan jika oknum LSM diperiksa sebagai salah satu saksi dari penyelidikan kasus dugaan penyelewengan dana desa sejak tahun 2017 hingga tahun 2019 ini.

Selain memeriksa oknum LSM sebagai saksi, polisi juga telah me-

eriksa mantan Kepala Dinas BPDDes Kabupaten, Drs Sirajudin berikut juga sejumlah pegawai yang ada dilingkup Pemda Bima.

"Dan ada tambahan dari Kadis serta perangkat desa lainnya di Waduruka. Semuanya masih kita periksa sebagai saksi," tukasnya di Mapolres kemarin.

Sebelumnya diwartakan, penyidik Tipidkor Polres Bima menyelidiki kasus dugaan penyimpangan

yang dilaporkan warga setempat, karena diduga merugikan negara sekitar Rp 300 juta.

Malah setelah hasil pengembangan penyidik, kerugian negara sebut polisi bisa membengkak hingga Rp 500 juta bahkan lebih. Dugaan itu setelah penyidik menelusik berbagai penyimpangan mulai dari pembangunan pagar Pustu, pagar lapangan serta sejumlah fasilitas desa lainnya. (BE09)

DIJUAL

**10 unit PS dan TV
lengkap dengan kursinya
Alamat: Jl. Gajah Mada
sebelah timur POM BensinPenatoi**

YANG BERMATI HUBUNGI: HP 0821 3794 1976

Dua Terduga Pelaku Penganiayaan Warga Sondosia Ditangkap di Empang

Bima, BimaEkspres.- Dua terduga pelaku penganiayaan terhadap Hendra Julianto Warga Sondosia, Kecamatan Bolo, telah ditangkap, sekitar pukul 01.00 Wita, Rabu (13/11). Dua terduga pelaku yaitu, Salias B (21) warga RT 10 Dusun Sigi Desa Rato dan B (20)

warga yang sama. "Kedua terduga pelaku ditangkap di Desa Gapi Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa," ujar Kapolsek Bolo, IPTU. Juanda, Rabu (13/11). Kata dia, penangkapan kedua terduga pelaku berkat adanya informasi dari

masyarakat yang mengetahui keberadaan keduanya. "Informasi dari masyarakat menjadi acuan kita menelusuri keberadaan pelaku. Alhasil kedua pelaku itu ditangkap di tempat persembunyiannya yaitu di Desa Gapi Kecamatan Empang Kabupaten Sum-



Camat Belo Lantik Anggota BPD Terpilih



Bima, BimaEkspres.- Camat Belo, Bambang Setiawan, S. Sos, melantik puluhan anggota BPD terpilih di 9 desa di Kecamatan Belo, Kabupaten Bima. Pengambilan sumpah serta pelantikan digelar di aula Kantor Camat setempat Rabu (13/11). Camat Belo menjelaskan, pengambilan sumpah jabatan Anggota BPD Kecamatan Belo ini, berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Bima, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keanggotaan BPD di Kabupaten Bima. "Anggota BPD terpilih di 9 Desa Kecamatan Belo akan menjabat sampai 2025,

saya harap anggota BPD yang baru saja dilantik, bisa bekerja dengan maksimal, dan memegang teguh amanah yang telah diberikan rakyat kepada kita," ujarnya. Kata Bambang, BPD adalah salah satu lembaga parlemen ditingkat desa. Tugas pokok dan fungsinya adalah untuk menyuarakan aspirasi rakyat, layaknya anggota dewan. Tugasnya harus mengedepankan hak dan keinginan masyarakat, untuk disampaikan kepada pihak Pemerintah Desa setempat. "Anggota BPD dipilih oleh rakyat, harus bisa bekerja untuk rakyat, jangan pernah sia-siakan amanah

yang telah diberikan rakyat kepada kita. Kita harus bisa menyerap semua aspirasi rakyat," jelasnya. Kata dia, tugas anggota BPD diatur dalam Permenmendagri, Perda dan Perbup, untuk meluruskan kinerja Pemerintahan Desa sesuai dengan tupoksi BPD. Puluhan Anggota BPD di Kecamatan Belo diambil sumpah jabatan selama 6 tahun kedepan, usai pelantikan. Bambang dan para tamu undangan lainnya juga memberikan ucapan selamat, atas terpilih dan dilantikannya Anggota BPD di Kecamatan Belo periode 2019-2025. (BE05)

bawa," jelasnya. Saat ini, lanjut dia, kedua terduga pelaku telah kita aman-kan sekaligus diproses lebih lanjut. "Saat penangkapan berjalan lancar tanpa hambatan," ungkap Juanda. Terkait kasus ini tetap dikembangkan, karena tidak menutup kemungkinan akan ada pelaku lain. "Kita usut kasus ini sampai tuntas. Tidak menutup kemungkinan ada pelaku lain," tutupnya. (BE07)

Begal... dari hal.1

korban," ujarnya. Anggota Buser yang melakukan pemantauan di wilayah yang dianggap rawan, tidak sengaja melihat Liu berada di Desa Ngali. Selama tiga hari pemantauan, akhirnya dapat dibekuk. "Sesuai dengan laporan di Polsek Belo dan Polres Bima, rekannya sudah diamankan terlebih dahulu, sehingga anggota melakukan pemantapan terhadap

tempat persembunyian pelaku," katanya. Setelah mendapat informasi, polisi memastikan posisi terakhir keberadaan pelaku. "Begitu mendapat informasi pelaku sudah pulang ke rumahnya, anggota langsung meluncur ke lokasi dan melakukan pengepungan," ungkapnya. Lanjut dia, saat dilakukan pengegedahan di rumahnya, pelaku sempat na-

ik dan bersembunyi di loteng. Namun aparat sudah curiga terlebih dahulu, karena saat memasuki rumah terdengar suara seperti orang naik ke atas loteng. "Anggota kemudian sigap langsung meringkus terduga pelaku tanpa ada perlawanan, saat diinterogasi di Polres, terduga pelaku baru delapan kali beraksi, dua kali merampas motor, enam kali merampas HP," bebernya. (BE05)

Herman Edison Daftar Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati di Gerindra



Bima, BimaEkspres.- Tahapan Pilkada Kabupaten Bima terus berjalan. Pengurus partai politik di Kabupaten Bima sudah membuka pendaftaran bakal calon Bupati Bima dan Calon Wakil Bupati Bima.

DPC Kabupaten Bima Partai Gerindra, Rabu (13/11) menerima pendaftaran H Herman Edison sebagai Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Bima.

Pengembalian formulir pendaftaran tersebut di Kantor DPC Gerindra Kabupaten Bima di Desa Donggobolo, Kecamatan Woha. Pendaftaran Herman diterima oleh Sekjen DPC Gerindra, Baharudin dan Wakil Ketua Desk Pilkada Gerindra, Ali Utsman Ahim.

Sekjen DPC Gerindra, Baharudin, menyampaikan,

untuk membangun Kabupaten Bima dibutuhkan generasi yang mampu bergerak dalam berbagai bidang. Agar memberikan perubahan yang signifikan kedepannya.

"Alhamdulillah, Herman ini benar-benar serius mendaftar di Partai Gerindra sebagai Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Bima, setelah mengambil Formulir pendaftaran beberapa hari lalu dan hari ini mengembalikannya," ujarnya.

Kata dia, H Herman Edison adalah salah satu tokoh yang serius maju berkompetisi pada Pilkada Kabupaten Bima. Keseriusannya ingin menjadikan Partai Gerindra sebagai kendaraan politik.

"Tokoh dari Kecamatan Donggo dan Soromandi ini benar-benar serius untuk ma-

ju di Pilkada Kabupaten Bima mendatang. Apapun niat kita yang tetap mendukung dan semoga diridhoi Allah SWT," sebutnya.

Dia mengaku, DPC Gerindra Kabupaten Bima telah membuka pendaftaran Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Bima sejak 22 Oktober lalu. Telah mengeluarkan 10 Formulir Pendaftaran untuk para bakal calon.

"Pendaftaran kita buka dari 22 Oktober sampai 15 November ini, dan sekarang sudah 5 orang yang telah mengembalikan formulir itu. Salah satunya H Herman Edison," jelasnya.

Adapun nama-nama 5 orang yang sudah mendaftar tersebut. Diantaranya, H Indah Dhamayanti Putri, H

Dahlan, Efendi, H. Syafruddin dan H. Herman Edison.

Sementara H. Herman Edison, diwakili Khalid, menyampaikan untuk mewujudkan perubahan pada tubuh Kabupaten Bima. Mesti ada pergerakan dari setiap elemen, baik itu pemerintah, Akademisi, Masyarakat dan lainnya.

"Kita sama-sama berjuang untuk mewujudkan Kabupaten Bima lebih baik lagi," ungkapnya.

Yang dibutuhkan adalah pemimpin yang memiliki visi membangun Daerah kedepan, dan pemimpin yang mampu bergerak dalam berbagai bidang.

"Kita memiliki visi yang sama untuk membangun Bima ini dengan berangkat dari niat yang ikhlas," tutupnya. **(BE05)**

Gerbang Kantor Desa Darusalam Disegel Calon BPD Yang Kalah



Bima, BimaEkspres.-

Pintu gerbang Kantor Desa Darusalam Kecamatan Bolo disegel oleh Calon Anggota BPD yang kalah, sekitar pukul 08.30 Wita, Rabu (13/11). Kapolsek Bolo, IPTU Juanda, membenarkan peristiwa tersebut. Namun tidak berlangsung lama lantaran kesiagaan anggota dalam merespon setiap permasalahan terjadi.

"Anggota respon cepat. Sehingga aksi sejumlah calon anggota BPD yang kalah di desa setempat dengan menyegel pintu gerbang dapat dibuka secepatnya," ujar Juanda.

Kata Kapolsek, kronologis kejadian, para calon Anggota BPD yang kalah mendengar informasi pelantikan anggota BPD secara serentak Se Kecamatan Bolo. Mendapat informasi tersebut, sejumlah calon BPD yang kalah secara spontan mengembok pintu gerbang atau pagar masuk ke kantor desa karena tidak menerima dengan pelantikan Anggota BPD terpilih," jelasnya.

Berdasarkan informasi di TKP, lanjutnya, adapun nama Calon BPD yang kalah yang melakukan penyegelan yakni IK, AH dan MH.

"Saat segel dibuka tidak tanggapan dan giat saat itu berjalan lancar," ungkapnya.

Pasca membuka segel, Kasub Sektor Daru, IPDA. Muhtar, memberikan pemahaman dan pengertian kepada para calon BPD yang tidak terpilih agar tidak mengambil langkah seperti gembok pintu pagar kantor desa. Karena kantor desa adalah fasilitas negara untuk pelayanan masyarakat.

"Usai membuka gembok pintu pagar. Kasub Sektor memberikan pemahaman terhadap warga," tutupnya. **(BE07)**

Tumpukan Sampah di Pasar Tente Keluarkan Aroma tak Sedap



Bima, BimaEkspres.-

Tumpukan sampah terlihat berserakan di luar bak penampungan sampah, tepatnya jalan masuk pasar Tente. Tumpukan sampah tersebut dikeluhkan pengguna jalan dan pengunjung pasar karena mengeluarkan bau busuk.

Hasnand pengunjung pasar Tente, mengatakan tumpukan sampah di sisi jalan kerap dikeluhkan pengunjung pasar. Pasalnya, selain merusak keindahan, juga kerap

kali mengeluarkan aroma tak sedap.

"Tumpukan sampah tersebut biasanya dibuang oleh pedagang dan warga di sekitar pasar. Mereka tidak menaruh dalam bak, justru membuang di luar sehingga beresakan begini," ujarnya, Rabu (13/11).

Kata dia, karena tumpukan sampah ini mengeluarkan bau busuk, pengunjung pasar merasa terganggu.

"Setiap pagi kami datang belanja di pasar, selalu

melihat sampah berserakan diluar bak, ini dibuang saat malam hari saat kondisi pasar tidak banyak aktivitas," katanya.

Penggunaan jalan Idris (38), juga mengeluhkan hal yang sama. Menurutnya, kesadaran masyarakat pada tempatnya sangat kurang.

Buktinya bak sampah tidak diisi penuh oleh sampah, tapi kenapa sampah bisa bercecer di luar hing-

ga di ruas jalan.

"Padahan ada bak sampah, kenapa dibuang diluar sampai bercecer di jalan, keluar bau busuk lagi, kami jado tida nyama setiap lewat," kata pria berprofesi sebagai tukang ojek. **(BE05)**



Bayar Listrik Tepat Waktu



Pastikan Anda telah membayar listrik sebelum tanggal 20 setiap bulan

- Keterlambatan pembayaran setiap bulan akan dikenakan denda dan pemutusan sementara.
- Apabila menunggak 3 bulan atau lebih akan dikenakan pembongkaran kWh meter.
- Penyambungan kembali dapat dilakukan jika telah melunasi tunggakan dan membayar biaya pasang baru.


www.pln.co.id

Pemprov Dukung Keberlanjutan ELPSA NTB untuk Tingkatkan Kemampuan Guru

Mataram, BimaEkspres.- Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah menerima kunjungan Tim ELPSA NTB di ruang kerjanya, Rabu (13/11/2019).

Kunjungan ELPSA NTB ini dalam rangka menindaklanjuti kegiatan yang telah berjalan selama empat tahun sejak zaman kepemimpinan Dr. TGH M Zainul Majdi.

Wakil Gubernur menyambut baik kedatangan ELPSA tersebut dan mendukung keberlanjutan program ELPSA yang bergerak untuk meningkatkan kemampuan para guru khususnya guru matematika.

"Kami akan mendukung program ini karena sangat bermanfaat untuk guru-guru kita di NTB,

saya juga sangat suka matematika," kata Wakil Gubernur yang biasa disapa Umi Rohmi ini.

Berkaitan dengan pendidikan yang dikhususkan untuk guru setingkat SMP ini, Umi Rohmi akan membantu untuk berkomunikasi dengan kabupaten/kota yang mana SMP berada di bawah naungan pemerintah kabupaten/kota.

Didampingi oleh Asisten I dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB, Umi Rohmi mengungkapkan bahwa, pendidikan merupakan pekerjaan rumah bagi pemerintah agar terus lebih baik. Pendidikan di NTB katanya harus dapat disinkronkan dengan keadaan NTB sekarang.

Sementara itu Manager Project ELPSA Prof. Tom

Lowrie dari University of Canberra mengatakan bahwa, ia ingin melihat bagaimana keadaan guru-guru yang telah mendapatkan pelatihan dari ELPSA.

Ia juga mengatakan, pelatihan ini berbeda dengan pelatihan-pelatihan lain yang mana pelatihan ini menuntut keaktifan dari guru.

"Saya ke sini melihat hasil yang susah dikerjakan, hasilnya sudah bagus. Perbedaan yang kami lakukan adalah para guru dituntut untuk mengembangkan kemampuan mereka dalam berfikir, dan hal itu terbukti meningkatkan kreatifitas mereka," terang Lowrie.

Manager Project ELPSA NTB, Gunawan dari Universitas Mataram me-

nyampaikan bahwa, peserta yang mendapat pelatihan ini telah diatur porsi kuotanya.

Tidak hanya PNS, namun guru-guru non PNS juga mendapat pelatihan ini. Selain itu, porsi kuota antara laki-laki dan perempuan disetarakan.

Untuk diketahui, program ELPSA ini adalah program kemitraan Indonesia-Australia GPF (Government Partnership for Development) yang empat tahun lalu diinisiasi oleh University of Canberra bekerjasama dengan IKIP Mataram, LPMP NTB, Dikpora NTB, dan Kemenag NTB.

Program ini didanai oleh Departemen Urusan Luar Negeri dan Perdagangan (DFAT) Australia. ELPSA ini adalah suatu kerangka

rancangan pembelajaran yang berasal dari singkatan dari *Experience, Language, Pictorial, Symbolic dan Application*, digagas oleh Centenary Professor Tom Lowrie dan Dr. Sitti Masuri Patahuddin dari University of Canberra.

Ada beberapa poin dalam pembelajaran ELPSA, antara lain bahwa, pembelajaran merupakan proses aktif, yakni siswa membangun sendiri ceritanya dan memahami sesuatu melalui proses mandiri dan berinteraksi sosial dengan siswa lain, mudah dipraktikkan dalam pembelajaran di kelas karena ELPSA bersifat siklus sehingga setiap komponen saling berhubungan satu sama lain.

Desain ELPSA juga

dilakukan secara terpadu, namun dapat dirancang mulai dari *language* terlebih dahulu kemudian *Picture*.

Sehingga diharapkan guru mampu merancang kegiatan pembelajaran yang mengandung kelima komponen tersebut secara utuh dalam satu materi pembelajaran.

Adapun hal terpenting untuk mendesain pembelajaran ELPSA yakni penekanan yang mampu menjadikan siswa memahami konsep secara maksimal melalui komponen *Symbolic* meskipun membutuhkan waktu yang cukup lama.

Lowrie mengibaratkan penekanan konsep *Symbolic* sebagai pondasi gedung yang mesti dibangun dengan kokoh. (BE04)

Program dan Perencanaan SDGs Harus Tepat Sasaran

Mataram, BimaEkspres.- Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah membuka kegiatan rapat koordinasi (Rakor) dengan tema Sinergitas Kerja Sama Multi Pihak Dalam Mendukung Pencapaian Target Sustainable Development Goals (SDGs) di Provinsi NTB. Rakor ini berlangsung di Ruang Rapat Geopark Rinjani Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi NTB, Rabu (13/11/2019).

Kegiatan ini diikuti oleh Kepala Bappeda Kabupaten/Kota Provinsi NTB, Perwakilan Bapennas dan juga Direktur SMERU Research Institute. Turut pula hadir sejumlah Kepala OPD lingkup Setda NTB, Ormas serta LSM.

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur menyampaikan pentingnya pembangunan berkelanjutan di NTB. Wagub juga meminta agar pemerintah dapat terus konsisten pada



program-program pembangunan.

"Butuh konsistensi yang sungguh-sungguh,

waktu yang mungkin tidak cepat, tapi kalau kita sudah berhasil membangun sistem yang baik maka nanti akan otomatis, multiplier effect-nya akan luar biasa," katanya.

Program dan perencanaan SDGs juga menurutnya harus tepat sasaran. Ia juga meminta kedepannya kegiatan bukan hanya berbentuk kegiatan seremonial saja. Kinerja dan wujud nyata di lapangan diharapkan juga dapat lebih ditingkatkan.

"Sehingga semua *stake holder* yang terkait ini betul-betul terkoneksi, tidak hanya formalitas, tetapi secara teknis dia juga konek

semua," sambungnya

Terakhir, Wagub berharap komunikasi dan koordinasi antar pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota agar terus terjalin dengan lancar, sehingga semua permasalahan dapat terselesaikan dengan baik.

"Semoga Rakor ini menghasilkan sesuatu yang produktif dan terimplementasi dengan baik," tambahnya.

Sementara itu, Kepala Bappeda Provinsi NTB, Ir. Wedha Magma Ardi, MTP mengungkapkan beberapa tujuan kegiatan Rakor.

Diantaranya, membangun kerja sama sinergis

antara lembaga pemerintah dan non pemerintah serta menyusun kebijakan, strategi dan inovasi untuk percepatan pencapaian target SDGs.

"NTB termasuk daerah yang berprestasi di dalam pencapaian-pencapaian SDGs, tentunya ini modal yang baik bagi kita semua," ungkapnya.

Selain itu, kegiatan ini diharapkan dapat menjadi ajang tukar pikiran dan berbagi pengalaman antar lembaga pemerintah dan juga non pemerintah. Terakhir, Ardi berharap seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan lancar dan sukses. (BE04)

Kasus ADD Rababaka Masih Diproses, Ada Indikasi Penyimpangan Bantuan Masjid

Dompu, BimaEkspres.- Kasus dugaan penyimpangan ADD / DD Tahun 2018 yang diduga dilakukan oleh Kades Rababaka, Tri Sutrisno, masih diproses. Saat ini kasusnya masih dalam tahap penyelidikan dengan memanggil beberapa saksi tambahan.

"Kami targetkan akhir tahun 2019 kasus ini rampung," kata Kasi Pidwas Kejaksaan Negeri Dompu, Isya Anshori,

SH, Rabu (13/11).

Adapun saksi tambahan kata Isya Anshori, yakni dua bendahara desa dan panitia pembangunan masjid. Pemeriksaan kedua ini karena ada dana desa yang diberikan untuk pembangunan masjid.

Namun dana bantuan itu tidak sampai Rp 100 juta. Itu diperkuat hasil klarifikasi ke panitia masjid yang mengakui bantuan tidak

sampai Rp 100 juta.

"Untuk bendahara desa hanya diminta klarifikasi untuk bukti pertanggungjawaban penggunaan ADD dan DD tahun 2018," katanya.

Dari keterangan ini ada indikasi bantuan untuk pembangunan masjid dislewevngkan. Rencananya akan memanggil sekretaris panitia pembangunan masjid untuk keterangan tambahan. (BE03)

NTB Raih Penghargaan Bunda PAUD tingkat Nasional

Mataram, BimaEkspres.-

Provinsi NTB kembali mencatatkan prestasi di tingkat nasional. Kali ini, Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Provinsi NTB, Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah, SE, M.Sc bersama Bunda PAUD Kabupaten Sumbawa, Hj. Amien Rahmani Husni Djibril, meraih penghargaan Bunda PAUD terbaik tingkat nasional.

Keputusan mengenai penghargaan itu dituangkan dalam keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Anwar Makarim, bernomor 416/P/2019 Tentang Penerima Penghargaan Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Keluarga Tahun 2019, tertanggal 4 November 2019.

Kepala Biro Humas dan Protokol Setda NTB, Na-

jamuddin Amy, S.Sos, MM, menerangkan, penghargaan yang diraih Hj. Niken ini merupakan buah kerja keras berbagai pihak. Upaya membangun PAUD di NTB, menurutnya merupakan bagian dari komitmen Pemprov NTB dalam memajukan kualitas sumber daya manusia (SDM) NTB sejak usia dini.

Menurut Najamuddin, NTB harus memiliki generasi yang cerdas dan berkualitas. Dan hal ini harus dibentuk dari usia dini. "Karena itulah, komitmen Bunda PAUD NTB, sangat terlihat dengan adanya berbagai terobosan yang telah dilakukan untuk meningkatkan tata kelola PAUD di NTB," ujarnya.

Sementara itu, dalam berbagai kesempatan, Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah pun kerap



Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah, SE, M.Sc

mengutarakan pentingnya pembentukan PAUD yang Holistik Integratif. Ia melihat, PAUD yang ada di NTB baru sebatas PA-

UD. Artinya belum holistik terintegratif. Dengan menjadi PAUD holistik integratif, maka akan terhubung dengan pelayanan Posyandu dan Bina

Keluarga Balita (BKB).

"Alangkah baiknya pendidikan balita yang merupakan investasi sangat besar itu merupakan pendi-

dikan menyeluruh. Yang memiliki akses kesehatan dan bagaimana orang tua mendidik balita," katanya.

Niken pun memberikan apresiasi terhadap Kabupaten Sumbawa yang telah mencanangkan diri sebagai kabupaten yang sangat peduli dengan PAUD holistik integratif. Komitmen Kabupaten Sumbawa ini juga terbayar dengan diraihnya penghargaan Bunda PAUD Nasional oleh Bunda PAUD Kabupaten Sumbawa, Hj. Amien Rahmani Husni Djibril.

Untuk diketahui, selain Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah dan Hj. Amien Rahmani Husni Djibril, warga NTB, Nurisah dan Nurhayati juga mendapatkan Penghargaan Orang Tua Hebat. (BE04)

Kantongi Tujuh Perunggu, NTB Urutan ke-26 Peparpenas 2019

Mataram, BimaEkspres.-

Pekan Paralympic Pelajar Nasional (Peparpenas) IX sudah berakhir dan secara resmi ditutup Menteri Pemuda dan Olahraga yang diwakili Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga Kemenpora, Raden Isnanta, Selasa (12/11/2019), di GOR Pulo Gadung, Jakarta Timur.

Pada Peparpenas IX yang berlangsung sejak 9 November 2019 itu, kontingen difabel NTB akhirnya menempati urutan ke-26 dari 34 provinsi peserta. NTB mengantongi 7 medali perunggu. Tujuh perunggu itu dipersembahkan para atlet dari cabang bulu tangkis dan boccia.

"NTB membawa pulang tujuh medali perunggu dari



event Peparpenas IX. Empat perunggu disumbang cabang bulutangkis, tiga dari nomor perorangan dan satu nomor ganda campuran. Tiga pe-

runggu lagi disumbang cabang boccia, dua nomor perorangan dan satu nomor ganda," papar Ketua Kontingen Peparpenas IX

NTB, Anang Zulkarnain.

Raihian tujuh medali perunggu yang dipersembahkan atlet-atlet difabel NTB itu, disambut suka cita oleh

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) NTB, Ir. Hj. Husnaniadiy Nurdin. Bagi dia, para atlet telah berjuang maksimal membawa NTB dan hasil tujuh perunggu itu adalah yang terbaik yang diberikan saat ini.

"Terima kasih atas kerjasama dan perjuangan atlet, pelatih dan pendamping. Inilah hasil terbaik kita saat ini. Mohon maaf bila ada salah kata dan kurangnya pelayanan dari Dispora. Maafkan kami. Sampai ketemu pada kegiatan selanjutnya," ucap Kadispora dalam percakapan grup WhatsApp Peparpenas NTB.

Sementara itu, kontingen Jawa Timur keluar sebagai juara umum Peparpenas IX. Jatim dinobatkan sebagai juara umum setelah mengumpulkan 20 medali emas, 2 perak dan 1 perunggu dengan total 23 medali di enam cabang yang diperlombakan, yakni atletik, renang, bulu tangkis, tenis meja, catur dan boccia.

Di posisi kedua, Jawa Tengah dengan 13 emas, 10 perak dan tiga perunggu dan posisi ketiga diduduki Provinsi Papua dengan raihian 11 emas, 8 perak dan 7 perunggu.

Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga, Raden Isnanta, saat menutup event tersebut, mengatakan meski Peparpenas ini menuntut para atlet menampilkan permainan terbaiknya, namun yang lebih penting adalah melawan keterbatasan.

"Yang memang kita semua di sini, atlet disabilitas yang berjuang bahwa kesetaraan itu mutlak dan mewujudkan prestasi itu pasti," kata dia dalam sambutannya.

Ia juga berharap para atlet terus memompa kemampuannya usai penyelenggaraan Peparpenas 2019, karena pemerintah akan memfasilitasi para atlet berprestasi untuk

merepresentasikan Indonesia pada event-event Internasional yang akan datang.

Berikut perolehan medali Peparpenas IX/2019: 1. Jawa Timur: 20 emas, 2 perak, 1 perunggu, 2. Jawa Tengah: 13 emas, 10 perak, 3 perunggu, 3. Papua: 11 emas, 8 perak, 7 perunggu, 4. Kalimantan Selatan: 9 emas, 16 perak, 6 perunggu, 5. Jawa Barat: 9 emas, 4 perak, 3 perunggu, 6. DI Yogyakarta: 8 emas, 3 perak, 3 perunggu, 7. Nusa Tenggara Timur: 8 emas, 1 perak, 2 perak, 8. Riau: 5 emas, 10 perak, 6 perunggu, 9. Bali: 4 emas, 8 perak, 6 perunggu, 10. DKI Jakarta: 4 emas, 6 perak, 2 perunggu, 11. Sumatera Utara: 3 emas, 10 perak, 4 perunggu, 12. Sumatera Selatan: 3 emas, 5 perak, 2 perunggu, 13. Kalimantan Barat: 3 emas, 3 perak, 1 perunggu, 14. Jambi: 3 emas, 2 perak, 9 perunggu, 15. Sulawesi Selatan: 3 emas, 2 perak, 5 perunggu, 16. Banten: 2 emas, 5 perak, 11 perunggu, 17. Aceh: 2 emas, 2 perak, 2 perunggu, 18. Kalimantan Tengah: 2 emas, 0 perak, 1 perunggu, 19. Kepulauan Riau: 1 emas, 1 perak, 3 perunggu, 20. Gorontalo: 1 emas, 1 perak, 2 perunggu, 21. Sulawesi Tenggara: 1 emas, 0 perak, 1 perunggu, 22. Kalimantan Timur: 0 emas, 1 perak, 2 perunggu, 23. Sulawesi Barat: 0 emas, 1 perak, 1 perunggu, 24. Maluku: 0 emas, 1 perak, 0 perunggu, 25. Sumatera Barat: 0 emas, 1 perak, 0 perunggu, 26. Nusa Tenggara Barat: 0 emas, 0 perak, 7 perunggu, 27. Bangka Belitung: 0 emas, 0 perak, 2 perunggu, 28. Bengkulu: 0 emas, 0 perak, 1 perunggu, 29. Sulawesi Tengah: 0 emas, 0 perak, 1 perunggu, 30. Kalimantan Utara: 0 emas, 0 perak, 0 perunggu, 31. Lampung: 0 emas, 0 perak, 0 perunggu, 32. Maluku Utara: 0 emas, 0 perak, 0 perunggu, 33. Papua Barat: 0 emas, 0 perak, 0 perunggu, 34. Sulawesi Utara: 0 emas, 0 perak, 0 perunggu. (BE08)

Wagub NTB Launching Pabrik Pakan di STIP Banyumulek

Mataram, BimaEkspres.-

Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalillah, me-launching pabrik pakan dan investasi lainnya di kawasan Science Technology Industrial Park (STIP) Banyumulek, Rabu (13/11/2019).

Acara tersebut dihadiri empat investor dari Negara Malaysia dipimpin oleh Datuk Rizal, sekaligus sebagai Wakil Ketua Dewan Perdagangan Islam Malaysia (DIPIM) yang sebelumnya telah melakukan peninjauan terkait potensi investasi di NTB.

Wagub NTB menyambut gembira kegiatan launching pabrik pakan di NTB itu. Hal ini sejalan dengan program industrialisasi yang sedang gencar dilakukan oleh Pemerintah Provinsi NTB. Selain pabrik pakan, Wagub juga menyambut baik pengembangan Pulau Dangar di Pulau Sumbawa oleh Investor Malaysia menjadi kawasan wisata berkelas

dunia.

Wagub sangat menyambut baik konsep pengembangan Pulau Dangar yang ramah lingkungan, tidak merusak ekosistem alam yang sudah ada saat ini. Menurutnya hal ini juga sejalan dengan apa yang menjadi konsen pemerintah membangun dunia investasi yang ramah lingkungan.

Untuk itu Wagub meminta jajaran pemerintah, baik provinsi dan kabupaten kota serta masyarakat NTB untuk selalu ramah dan mempermudah segala urusan terkait dengan investasi. Dengan demikian maka investasi lainnya akan segera terbangun di NTB.

Ia menegaskan bahwa pemerintah telah berkomitmen untuk mempermudah segala urusan investasi di NTB. Selama hal tersebut saling menguntungkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Kami berkomitmen untuk mempermudah investasi di NTB, selama muaranya

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat," katanya.

Sementara itu, Wakil Khas DPIM, Datuk Sri Mohd Rizal, mengatakan pembangunan pabrik pakan dan pengembangan Pulau Dangar di Sumbawa merupakan pembuktian terhadap komitmennya untuk melakukan investasi di NTB.

Ia mengungkapkan dalam proses peninjauan investasi di NTB, cukup banyak rekan bisnisnya yang pesimis karena permasalahan rumitnya administrasi di Indonesia.

"Dengan Investasi ini kami buktikan bahwa pemerintah NTB sangat ramah dan bersahabat dengan investasi. Jadi anggapan teman kami itu salah," ungkapnya.

Datuk Rizal menjelaskan, konsep pembangunan yang akan dilakukan di NTB adalah ramah lingkungan. Untuk area pabrik pakan di STIP se-

luas 4 hektar, ground breaking akan dilakukan Desember mendatang, bertepatan dengan hari ulang tahun Provinsi NTB. Daya produksi pabrik pakan sebesar 16.000 ton per tahun untuk kebutuhan lokal. Peningkatan kapasitas produksi akan sejalan dengan permintaan pasar.

Sedangkan untuk kebutuhan bahan baku dan pekerja, ia mengungkapkan bahwa 60 persen bahan baku adalah hasil dari komoditas daerah di NTB.

Namun kedepan ia berharap bahan baku benar-benar 100 persen dihasilkan di NTB. Untuk tenaga kerja, 100 persen adalah dari NTB.

Sedangkan untuk nilai investasi pembangunan pabrik pakan, ia memperkirakan sekitar Rp 60 miliar.

Belum termasuk investasi lainnya, seperti pembangunan Pabrik Kanal Baja dan Rumah Tahap Gempa. (BE08)

PENGUMUMAN PENDAFTARAN

**KELOMPOK KERJA
PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN
BAWASLU KABUPATEN BIMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**
Sekretariat: Jln. Lintas Bima-Sumbawa Desa Talabiu Kec. Woha
No. Telp. (0374) 668165, Email: panwascampokjabima@gmail.com

**PENGUMUMAN
PENDAFTARAN CALON
ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020**
Nomor: 01/Pokja Bawaslu Kab-BM/KP.01.00/XI/2019

Dalam rangka pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020, maka Kelompok Kerja Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Bawaslu Kabupaten Bima berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2017 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2019 atas kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum membuka kesempatan bagi Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan untuk mendaftarkan diri sebagai calon anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan.

1. Persyaratan calon anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan adalah sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Pada saat pendaftaran berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
 - c. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - d. Bersedia mengundurkan diri dari organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum atau tidak apabila terpilih;
 - e. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih;
 - f. Mempunyai integritas, kepribadian yang kuat, jujur dan adil;
 - g. Berdomisili di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik;
 - h. Memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu, ketatanegaraan, kepartaian, dan pengawasan Pemilu;
 - i. Tidak pernah menjadi anggota partai politik atau telah mengundurkan diri dari anggota partai politik sedikinya 5 (lima) tahun pada saat mendaftar;
 - j. Tidak sedang atau tidak pernah menjadi anggota tim kampanye salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan daerah, serta pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;
 - k. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
 - l. Mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau di badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah pada saat mendaftar;
 - m. Bekerja bekerja penuh waktu;
 - n. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;
 - o. Bersedia mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan pemerintahan, dan/atau di badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah pada saat mendaftar;
 - p. Tidak dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu; dan/atau tidak pernah diberhentikan secara tidak hormat dari penyelenggaraan Pemilu oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Bawaslu Kabupaten/Kota, KPU, atau KPU Kabupaten/Kota.
 - r. Mendapatkan izin dari atasan langsung bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
2. Mengajukan surat lamaran yang ditunjukkan kepada Kelompok Kerja Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Bawaslu Kabupaten Bima dengan melampirkan:
 - a) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik;
 - b) Pas foto warna terbaru ukuran 4x6 sebanyak 5 (lima) lembar latar belakang merah;
 - c) Fotokopi ijazah pendidikan terakhir yang disahkan/dilegalisir oleh pejabat berwenang;
 - d) Daftar Riwayat Hidup;
 - e) Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit pemerintah atau Puskesmas;
 - f) Surat keterangan bebas dari penyalahgunaan narkoba dari rumah sakit atau Puskesmas yang dapat disampaikan sebelum pelantikan;
 - g) Surat izin dari atasan langsung bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
 - h) Surat pernyataan:
 - 1) Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita proklamasi 17 Agustus Tahun 1945;
 - 2) Bersedia mengundurkan diri dari organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum atau tidak apabila terpilih;
 - 3) Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - 4) Tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara;
 - 5) Tidak sedang atau tidak pernah menjadi anggota tim kampanye salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah, serta pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;
 - 6) Bersedia bekerja penuh waktu;
 - 7) Mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau di badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah pada saat mendaftar;
 - 8) Tidak pernah diberhentikan secara tidak hormat dari penyelenggaraan Pemilu oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Bawaslu Kabupaten/Kota, KPU, atau KPU Kabupaten/Kota.
 - 9) Tidak pernah diberhentikan secara tidak hormat dari penyelenggaraan Pemilu oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Bawaslu Kabupaten/Kota, KPU, atau KPU Kabupaten/Kota.
3. Pelamar melampirkan keterangan atau bukti lain yang mendukung kompetensi pelamar sebagai dasar penilaian dalam seleksi administrasi.
4. Formulir berkas calon anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan dan keterangan lebih lanjut dapat diperoleh di laman Bawaslu Kabupaten Bima, media sosial, atau sekretariat Bawaslu Kabupaten Bima.
5. Dokumen pendaftaran dapat dikirim melalui pos kilat atau disampaikan secara langsung ke Sekretariat Kelompok Kerja Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Bawaslu Kabupaten Bima, Jln. Lintas Bima-Sumbawa Desa Talabiu Kecamatan Woha Kabupaten Bima.
6. Dokumen persyaratan dibuat masing-masing rangkap 3 (tiga), terdiri dari 1 (satu) rangkap asli dan 2 (dua) rangkap fotokopi.
7. Waktu penerimaan pendaftaran mulai tanggal 27 November s/d 3 Desember 2019.
8. Pendaftaran dan seleksi tidak dipungut biaya.

13 November 2019

**KELOMPOK KERJA
PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN
BAWASLU KABUPATEN BIMA**

Ketua

Sekretaris

JUNAIDIN, S.Pd

MARIAM, S.Sos

116 BPD Terpilih di Bolo Dilantik



Bima, BimaEkspres.-

Sebanyak 116 anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Masa bakti 2019 sampai 2025 di Kecamatan Bolo dilantik dan diambil sumpah jabatannya, di aula kantor camat setempat, Rabu (13/11). Hadir pada pelantikan itu, Kabid Pmdes DPMDes Kabupaten Bima, Camat Bolo, Kepala KUA Bolo, Danramil, Kapolsek serta unsure lainnya.

Sebanyak 116 BPD terpilih tersebut merupakan total dari keseluruhan anggota BPD yang berada di 14 desa di kecamatan setempat. Pelantikan itu berdasarkan surat keputusan (SK) Bupati Bima nomor: 188.45/694/06.16.-Tahun 2019.

Camat Bolo, Mardianah SH, menyampaikan, tugas BPD cukup berat. Untuk itu BPD tidak boleh main main dalam menjalankan tugasnya. "Tugas BPD bukan saja sebagai penyambung lidah masyarakat. Tapi banyak tugas lain yang menanti," ucap Camat Bolo.

Kata dia, baik buruknya

suatu desa tergantung pada kinerja BPD. Kalau kinerja BPD baik, mak baik pula kondisi desa.

"Kerja keras dan serius BPD sangat diperlukan dalam membangun desa," jelasnya.

Dalam kelembagaan BPD terdiri dari unsur pimpinan dan kepala bidang. Unsur pimpinan terdiri dari ketua wakil ketua dan sekretaris, sementara kepala bidang terbagi menjadi 2 kepala bidang.

"Semuanya harus paham, tugas dan fungsinya. Jika belum paham, jangan malu untuk bertanya kepada yang lebih berpengalaman," ungkapnya. Camat juga menyampaikan selamat kepada seluruh anggota BPD terpilih yang baru saja dilantik. Juga ucapan terimakasih kepada mantan anggota BPD yang masa jabatannya telah berakhir.

"Kami sangat berterimakasih atas bakti dan kinerjanya selama ini," tutupnya.

Kabid Pmdes DPMDes

Kabupaten Bima, El Faisal, SEI, MM, menyampaikan, selamat kepada seluruh anggota BPD yang baru saja dilantik. Semoga amanah dalam menjalankan tanggung jawab yang diberikan.

Selain itu, juga harus bisa bermanfaat dan berkontribusi untuk pembangunan desa dan masyarakatnya.

"Minimal keterwakilan wilayah bermanfaat untuk masyarakat di wilayahnya, dan keterwakilan perempuan bermanfaat buat perempuan di desa," ungkapnya.

Dia mengimbau kepada anggota BPD yang baru dilantik agar membaca banyak referensi mengenai tugas dan fungsinya.

Kemudian dalam menjalankan tugas, BPD harus mengedepankan pembacaan yang baik dan dibahas dalam internal BPD baru disampaikan kepada Kepala Desa.

"Sampaikan juga diforum kepada kepala desa. Tapi sebelumnya lakukan kajian terlebih dahulu," imbaunya. (BE07)

Batas Pemilihan Ketua BPD Tiga Hari Pasca Dilantik



Bima, BimaEkspres.-

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2019 tentang peraturan pelaksanaan pertauran daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) perlu menetapkan keputusan BPD tentang penetapan pimpinan dan Ketua bidang BPD. Ketua dan sekretaris.

Sedangkan untuk Ketua Bidang yakni Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembinaan Masyarakat serta Ketua Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Terkait hal itu, BPD terpilih

memiliki tenggat waktu selama tiga hari untuk melaksanakannya.

"Terhitung sejak pelantikan. BPD terpilih harus melakukan pemilihan Ketua dan unsur lain," ujar Kasi Pemerintahan Kecamatan Bolo, H. Gunawan, M. Pd, Rabu (13/11).

Kata H. Gun sapannya, secara teknisnya dilakukan rapat pleno yang melibatkan BPD terpilih. Dalam rapat tersebut, BPD terpilih yang tertua dan termuda akan memimpin rapat.

"Tidak boleh ada keterwakilan lain. Rapat pleno hanya diikuti oleh BPD terpilih," ungkap dia.

Setelah rapat pleno usai dan menghasilkan siapa

yang menjadi Pimpinan dan Ketua Bidang. Saat itu juga Pimpinan BPD membuat SK dan selanjutnya disampaikan ke Pemerintah Kecamatan untuk mendapatkan pengesahan.

"Selain mendapat pengesahan dari Pemerintah Kecamatan. Komposisi kepengurusan BPD juga mendapatkan SK dari Camat," pinta dia.

Dirinya berharap, kepada seluruh BPD terpilih agar menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik sehingga apa yang diharapkan terwujud nyata.

"Hindari hal-hal yang akan merusak marwah BPD. Sehingga nama baik BPD tetap terjaga," tutupnya. (BE07)